

**KAJIAN UMKM DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021**

***STUDY OF MSMEs IN THE CONTEXT OF REGIONAL ECONOMIC RECOVERY IN
BOGOR REGENCY in 2021***

Fahira Nur Aqilla

Bappedalitbang Kabupaten Bogor

Jl Segar III Kav 2 Kompleks Perkantoran Pemda Bogor, Kabupaten Bogor, Indonesia

fahiranuraqilla036@gmail.com

ABSTRACT

The involvement of MSMEs in the economic process needs to be observed, considering that the level of productivity must continue to be developed in addition to large businesses. However, Covid-19 has greatly impacted various sectors of life, not a few MSME actors who help develop businesses. In order to re-grow and increase the effectiveness of MSMEs, it is necessary to make new breakthroughs so that the wheels of the community's economy can turn again. This research method is a quantitative and qualitative method which is presented descriptively and exploratory to describe the results of the analysis. Data collection techniques were carried out through literature searches, FGDs, and interviews. The data were analyzed using the current basic data analysis (existing condition) and regional strategy analysis. The number of MSMEs in Bogor Regency is recorded at 12,556 business units in 40 sub-districts from various types of businesses. The results of the study show that MSME actors from processing fishery products have the potential of a variety of varied and innovative products. Various problems faced by MSMEs during the Covid-19 pandemic such as declining consumer purchasing power, marketing, business licensing due to general problems. Another problem that is often faced by SMEs is the lack of qualifications and competence of human resources. Various strategies were carried out to deal with the Covid-19 pandemic, especially in the MSME sector, namely: 1) Ease of business permits; 2) Capital assistance; 3) Protection commodity; 4) Digital marketing and promotion training; 5) HR competency training.

Keywords: MSMEs, potential, recovery strategy

ABSTRAK

Keterlibatan UMKM dalam proses pembangunan ekonomi perlu dicermati, mengingat tingkat produktivitasnya harus terus dikembangkan disamping usaha besar. Namun, Covid-19 sangat berdampak pada berbagai sektor kehidupan, tidak sedikit pelaku UMKM terdampak yang kesulitan mengembangkan usahanya. Dalam rangka menumbuhkan kembali dan meningkatkan efektivitas UMKM perlu dilakukan terobosan baru agar roda ekonomi masyarakat dapat kembali berputar. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif yang disajikan secara deskriptif dan eksploratif untuk menggambarkan hasil analisis. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui penelusuran literatur, FGD, dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan analisis data dasar saat ini (*existing condition*) dan analisis strategi daerah. Jumlah UMKM di Kabupaten Bogor terdapat sebesar 12.556 unit usaha pada 40 kecamatan dari berbagai komoditas atau jenis usaha. Hasil penelitian menunjukkan pelaku UMKM dari pengolahan hasil perikanan memiliki potensi dari ragam produk yang bervariasi dan inovatif. Berbagai masalah dihadapi oleh UMKM pada masa pandemi Covid-19 seperti menurunnya daya beli konsumen, pemasaran, perizinan usaha karena masalah umum. Permasalahan lain yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM adalah minimnya kualifikasi dan kompetensi SDM. Berbagai strategi yang dilakukan untuk menghadapi pandemi Covid-19 terutama pada sektor UMKM yaitu: 1) Kemudahan izin usaha; 2) Bantuan modal; 3) Perlindungan komoditas; 4) Pelatihan promosi dan pemasaran digital; 5) Pelatihan kompetensi SDM.

Kata Kunci: Potensi, strategi pemulihan, UMKM

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, definisi usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 juga diamanatkan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan dalam pengembangan usaha, menumbuhkan iklim usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan UMKM sebagai kelompok terbesar yang memiliki peran dalam tatanan perekonomian nasional dan dinamisator pertumbuhan ekonomi serta bingkai ekonomi kerakyatan.

Adanya peranan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah tidak menghilangkan berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi oleh UMKM baik secara internal maupun eksternal seperti dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan dan iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan usaha mikro dan kecil, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang fasilitasi pemasaran, kelembagaan, pendanaan/permodalan, dan pengembangannya. Akan tetapi kebijakan tersebut belum teralisasi secara optimal dikarenakan kebijakan yang belum mampu memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Sehubungan dengan itu usaha mikro dan kecil perlu diberdayakan dengan cara menumbuhkan iklim usaha yang mendukung pengembangan dan pembinaan UMKM.

Dalam kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami kontraksi hingga minus, UMKM mampu bertahan dan berperan sebagai tumpuan kemajuan ekonomi Indonesia. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengatakan, pada kuartal III, perekonomian Indonesia akan mengalami kontraksi hingga minus 2,9% hingga minus 1,1%, Angka tersebut lebih dalam jika dibandingkan dengan proyeksi awalnya, yakni sebesar minus 2,1% hingga 0%. Adapun keseluruhan, pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun akan berada di kisaran minus 1,7% hingga minus 0,6%. Adanya hal tersebut maka tidak menutup kemungkinan resesi ekonomi di Indonesia akan terjadi (Kompas.com, 2021).

Resesi ekonomi dapat terjadi, jika produk domestik bruto (PDB) negatif, meningkatnya tingkat pengangguran, penurunan penjualan ritel, ukuran pendapatan menurun dan manufaktur yang berkontraksi untuk periode waktu yang panjang. Jika dilihat pada laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut lapangan usaha (%) di Kabupaten Bogor dari tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, seperti terlihat pada Tabel. 1.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2020

Kategori	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)		
	2018	2019	2020
Jasa Perusahaan	0,29	0,38	(10,90)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,30	0,22	(9,27)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,34	0,29	(6,83)
Konstruksi	0,45	0,34	(5,25)
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,11	(4,10)
Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	0,19	0,31	(4,32)
Jasa Lainnya	0,36	0,34	(3,09)
Industri Pengolahan	0,26	0,25	(2,53)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,08	0,09	(1,89)
PDRB Kabupaten dengan Migas	0,26	0,27	(1,77)
PDRB Kabupaten tanpa Migas	0,26	0,27	(1,77)
Pertambangan dan Penggalian	0,12	(1,27)	0,05
Transportasi dan Pergudangan	0,34	0,35	(1,30)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,11	0,11	0,06
Jasa Keuangan	0,29	0,32	0,06
Jasa Pendidikan	0,26	0,25	0,30
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,29	0,38
Real Estate	0,42	0,40	0,20
Informasi dan Komunikasi	0,38	0,39	30,92
Rata-rata	0,27	0,19	(1,11)
Rata-rata 3 tahun		(1,20)	

Sumber: Bappedalitbang, 2021

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa 3 (tiga) tahun terakhir ini Kabupaten Bogor mengalami resesi karena laju pertumbuhan berada dipoin negatif yaitu -1,2. Resesi tersebut dapat ditangani dengan mengandalkan belanja pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi. Bupati Bogor menyebutkan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 difokuskan pada pemulihan ekonomi imbas dari pandemi Covid-19. Untuk itu diperlukan beberapa langkah strategis yang perlu dikaji guna pemulihan ekonomi di Kabupaten Bogor.

Langkah strategis yang dilakukan adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang juga di kenal secara luas dengan sebutan Omnibus Law . UU No. 11 Tahun 2020 merupakan suatu undang-undang yang disahkan dengan tujuan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya melalui perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Pada pembahasan mengenai kemudahan perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM pengaturan materi dibagi menjadi 10 bagian sebagai berikut: 1). Umum; 2). Koperasi; 3). Kriteria UMKM; 4). Basis data tunggal; 5). Pengelolaan terpadu basis data mikro dan kecil (UMK); 6). Kemitraan; 7). Kemudahan ijin berusaha; 8). Kemudahan fasilitas pembiayaan dan insentif fiskal; 9). Dana alokasi khusus, bantuan pendampingan hukum, pengadaan barang dan jasa dan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan dan inkubasi; 10). Partisipasi UMK dan koperasi pada infrastruktur publik.

Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung penuh UMKM untuk terus berkembang dan berkesinambungan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam era digital ini adalah membangun web portal UMKM Kabupaten Bogor sebagai pusat *data base* dan media efektif promosi produk-produk UMKM, dan pemetaan pertumbuhan UMKM Kabupaten Bogor. Adanya aplikasi UMKM *Go Digital* tersebut digunakan untuk pemasaran produk UMKM dengan mudah tanpa batas ruang, waktu dan menjangkau pasar yang lebih luas. Sektor UMKM memiliki peran dalam menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dengan majunya sektor usaha UMKM akan dapat mengurangi angka pengangguran. Selain itu, keterlibatan UMKM dalam proses pembangunan ekonomi perlu dicermati, mengingat tingkat produktivitas UMKM harus terus dikembangkan di samping usaha besar.

Namun demikian pandemi Covid-19 sangat berdampak pada berbagai sektor kehidupan sosial ekonomi, tidak sedikit pelaku UMKM terdampak yang kesulitan mengembangkan usahanya. Dalam rangka menumbuhkan kembali dan meningkatkan efektifitas UMKM perlu dilakukan terobosan-terobosan baru agar roda ekonomi masyarakat dapat kembali berputar. Oleh karenanya, diperlukan fokus terhadap strategi perencanaan dalam memasarkan produk/komoditi UMKM agar dapat bangkit kembali. Agar pengembangan UMKM tersebut lebih terarah maka perlu disusun perencanaan yang baik dengan melibatkan berbagai *stake holders* serta dijabarkan dalam bentuk rencana aksi multi pihak pada kurun waktu tertentu.

Studi terdahulu menunjukkan peran penting UMKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Putra, 2016; Suci, 2017; Sofyan, 2017; Sarfiah *et al.*, 2019; Halim, 2020; Kadeni, 2020). UMKM merupakan salah satu usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM mampu mengatasi beberapa permasalahan ekonomi negara dengan menghasilkan barang/jasa yang dihasilkan yang diperuntukkan kepada masyarakat, mengatasi masalah pengangguran, dan mampu menciptakan lapangan kerja (Sofyan, 2017) termasuk kemiskinan (Anugerah dan Nuraeni, 2021). Selain itu, UMKM sangat berperan dalam membangkitkan ekonomi, mempunyai kemampuan mencari solusi melalui teknologi, inovasi, dan investasi dalam masa pandemi Covid-19 (Wahyunti, 2020; Mutrofin *et al.*, 2021). Atas dasar hal tersebut, maka dilakukan penelitian pembahasan langkah strategis UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Bogor.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi Kabupaten Bogor memiliki objek penelitian yaitu UMKM yang ada di Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif yang disajikan secara deskriptif dan eksploratif untuk menggambarkan hasil analisis. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui penelusuran literatur (*literature review*), *focus group discussion* (FGD), wawancara responden yang terdiri dari pelaku UMKM dan tokoh masyarakat dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis yang memungkinkan diperlukan dalam penelitian UMKM di Kabupaten Bogor terdiri dari dua jenis analisis.

2.1. Analisis Data Dasar Saat Ini (Existing Condition)

Analisis ini diarahkan untuk mengolah data dan informasi dengan menggunakan konsep *big data* dengan metode *data mining*. *Data mining* membantu perusahaan atau organisasi untuk

mendapatkan pola dari data-data yang tersimpan di dalam basis data perusahaan. Pengetahuan yang diperoleh tersebut akan menjadi pedoman dalam mengambil tindakan-tindakan bisnis sebagai upaya pemeliharaan dan peningkatan tingkat kompetitif bisnis perusahaan. Walaupun sudah banyak perangkat lunak yang menawarkan kemampuan dalam proses data *mining*, keterlibatan manusia sangat dibutuhkan dalam setiap fase proses data *mining* itu sendiri. Pemahaman terhadap model statistik dan matematik yang digunakan dalam perangkat lunak sangat dituntut. Karakteristik data *mining* adalah sebagai berikut:

1. Data *mining* berhubungan dengan penemuan sesuatu yang tersembunyi dan pola data tertentu yang tidak diketahui sebelumnya.
2. Data *mining* biasa menggunakan data yang sangat besar. Biasanya data yang besar digunakan untuk membuat hasil lebih dipercaya.
3. Data *mining* berguna untuk membuat keputusan yang kritis, terutama dalam strategi (Abdillah *et al.*, 2016).

a) *Klustering Data UMKM di Kabupaten Bogor*

K-means merupakan salah satu metode *clustering* berbasis partisi, metode ini sangat sederhana, dimulai dengan pemilihan jumlah *cluster* sebanyak K buah. Selanjutnya, K buah data diambil secara acak dari *dataset* sebagai *centroid* yang mewakili suatu *cluster*. *Centroid* merupakan pusat atau titik tengah dari suatu *cluster*. Semua data kemudian dihitung jaraknya terhadap setiap *centroid* dan setiap data akan menjadi anggota dari sebuah *cluster* yang diwakili oleh *centroid* yang memiliki jarak terdekat dengan data tersebut. Tahap terakhir adalah penghitungan ulang nilai *centroid* yang diperoleh dari nilai rata-rata dari setiap *cluster* yang ada. Proses pemilihan keanggotaan *cluster* dan penghitungan ulang *centroid* dilakukan terus menerus dan berhenti jika keanggotaan *cluster* tidak mengalami perubahan atau jumlah perulangan yang dilakukan telah melampaui suatu nilai batas tertentu (Adinugroho dan Sari, 2018)

Dapat disimpulkan *k-means* merupakan salah satu metode *clustering* yang populer digunakan untuk mendapatkan dekripsi dari sekumpulan data dengan cara mengungkapkan kecenderungan setiap individu data untuk berkelompok dengan individu-individu data lainnya. Pertama yang harus dilakukan yaitu pemilihan jumlah *cluster* sebanyak K buah. Selanjutnya, K buah data diambil secara acak dari *dataset* sebagai *centroid* yang mewakili suatu *cluster*, tahap terakhir adalah penghitungan ulang nilai *centroid* yang diperoleh dari nilai rata-rata dari setiap *cluster* yang ada.

b) *Klasifikasi Potensi Produk Unggulan di Kabupaten Bogor*

Algoritma C4.5 merupakan salah satu teknik *decision tree* yang sering digunakan, yang menghasilkan beberapa aturan dan sebuah pohon keputusan dengan tujuan untuk meningkatkan keakuratan dari prediksi yang sedang dilakukan (Lestari *et al.*, 2017). Sedangkan, yang dimaksud penerapan algoritma C4.5 merupakan salah satu solusi pemecahan kasus yang sering digunakan dalam pemecahan masalah pada teknik klasifikasi yang memiliki karakteristik yaitu dengan proses penentuan nilai entropy dan nilai gain dari kemungkinan setiap kriteria yang menjadi acuan keputusan yang dilanjutkan dengan proses perangkining dari hasil keputusan.

Keluaran dari algoritma C4.5 yaitu berupa sebuah pohon keputusan (*decision tree*). Pohon keputusan adalah sebuah struktur yang dapat digunakan untuk mengubah data menjadi pohon keputusan yang akan menghasilkan aturan-aturan keputusan (Syahputra, 2014)

Pada tahap algoritma C4.5 memiliki dua prinsip kerja yaitu:

1. Pembuatan Pohon Keputusan

Tujuan dari algoritma penginduksi pohon keputusan adalah mengkonstruksi struktur data pohon yang dapat digunakan untuk memprediksi kelas dari sebuah kasus atau *record* baru yang belum memiliki kelas. C4.5 melakukan konstruksi pohon keputusan dengan metode *divide and conquer*. Pada awalnya hanya dibuat node akar dengan menerapkan algoritma *divide and conquer*. Algoritma ini memilih pemecahan kasus terbaik dengan menghitung dan membandingkan gain ratio, kemudian node-node yang terbentuk di level berikutnya, algoritma *divide and conquer* akan diterapkan lagi sampai terbentuk daun-daun.

2. Pembuatan Aturan-Aturan (*rule set*).

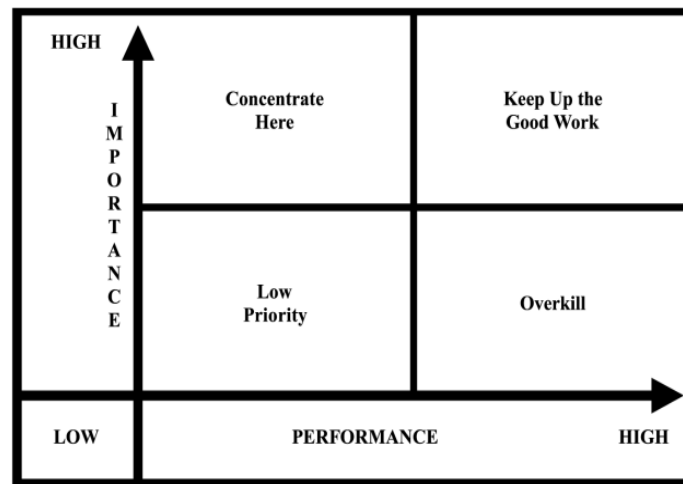
Aturan-aturan yang terbentuk dari pohon keputusan akan membentuk suatu kondisi dalam bentuk *if-then*. Aturan-aturan ini didapat dengan cara menelusuri pohon keputusan dari akar sampai daun. Setiap node dan syarat percabangan akan membentuk suatu kondisi atau suatu *if*, sedangkan untuk nilai-nilai yang terdapat pada daun akan membentuk.

Pada saat pembangunan pohon keputusan, banyaknya cabang mungkin mencerminkan adanya *noise* atau *outlier* pada *training* data. Pemangkasan pohon dapat dilakukan untuk mengenali dan menghapus cabang-cabang tersebut. Pohon yang dipangkas akan menjadi lebih kecil dan lebih mudah dipahami. Pohon semacam itu biasanya juga menjadi lebih cepat dan lebih baik dalam melakukan klasifikasi (Widayu *et al.*, 2017)

2.2. Analisis Strategi Daerah

Analisis strategi daerah menggunakan metode *Importance Performance Analysis* (IPA). Alternatif strategi ini yang nantinya dapat diterapkan oleh UMKM di Kabupaten Bogor, mengikuti hasil analisa yang didapat dari IPA analisis. Berbagai bentuk tindakan dan strategi yang dapat direalisasikan antara lain pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal, membangun jejaring UMKM berpusat di *Creative Centre*, memanfaatkan potensi produk dominan dari luar daerah, membangun peran BUMDes dalam jejaring ekonomi lokal dan pengembangan usaha mikro kecil pada pasar terprogram. Hasil analisis dengan metode *Importance Performance Analysis* (IPA) akan dilanjutkan dengan analisis mengenai potensi dampak sektoral.

Teknik analisis *Importance Performance Analysis* (IPA) dikemukakan pertama kali oleh John. A. Martilla dan John C. James (1977). Dalam teknik ini responden diminta untuk membuat peringkat berbagai atribut atau elemen dari penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap atribut tersebut. Selain derajat kepentingan, responden juga diminta membuat peringkat seberapa baik kinerja perusahaan dalam masing-masing atribut yang diperingkatkan pada derajat kepentingan, sehingga hasilnya dapat dianalisis dengan menggunakan kuadran.



Gambar 1. Kuadran Analisis *Importance Performance Analysis*

Sebagai pedoman bagi pelanggan untuk menilai tingkat kepentingan kualitas pelayanan, digunakan skala semantic differential dengan nilai 1-4 dan menilai tingkat kinerja layanan juga menggunakan skala yang sama dengan nilai 1-4. Analisis diawal dengan menyebarkan kuesioner ke pelanggan satu per satu dari rumah ke rumah, setiap pertanyaan memiliki 1 pertanyaan dengan 2 jawaban untuk mengukur tingkat kepentingan dan kinerjanya, apakah menurut pelanggan hal tersebut penting dilakukan atau dilaksanakan dan bagaimana kinerjanya, baik atau tidak baik.

Tabel 2. Skor Skala Tingkat Kinerja dan Tingkat Kepentingan

Skor	Tingkat Kinerja	Tingkat Kepentingan
4	Sangat Baik	Sangat Penting
3	Baik	Penting
2	Tidak Baik	Tidak Penting
1	Sangat tidak Baik	Sangat Tidak Penting

Metode IPA ini menggunakan bantuan diagram kartesius untuk menggambarkan kondisi kinerja dan kepentingan yang ditentukan oleh pelanggan. sehingga diperlukan koordinat yang diperoleh dari nilai rata-rata skor tingkat kepentingan dan tingkat harapan dari pelanggan. Adapun dengan berkembangnya perekonomian dilakukan perubahan regulasi yang diatur dalam Undang-undang Cipta Kerja. Perbedaan signifikan akibat perubahan undang-undang ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbedaan Kriteria UMKM

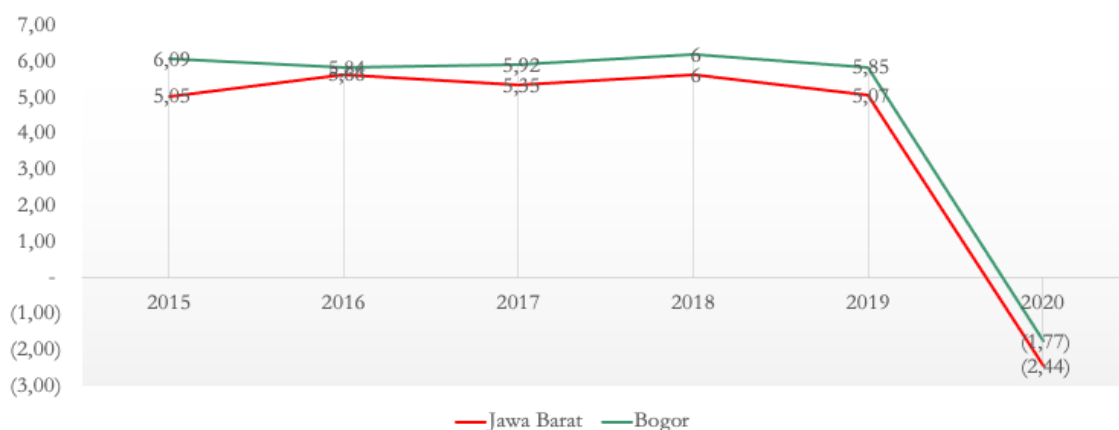
Indikator	UU UMKM	PP UMKM
Pengelompokan UMKM	UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah di kurangi dengan hutang atau kewajiban.	UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.

Indikator	UU UMKM	PP UMKM
Kekayaan Bersih atau Modal Usaha	1.Usaha Mikro: paling banyak Rp 50 juta. 2. Usaha Kecil: lebih dari Rp 50juta – paling banyak Rp 500 juta. 3. Usaha Menengah: lebih dari Rp500 juta – paling banyak Rp 10 miliar. Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.	1. Usaha Mikro: paling banyak Rp 1 miliar. 2.Usaha Kecil: lebih dari Rp1miliar – paling banyak Rp5 miliar. 3.Usaha Menengah: lebih dari Rp5 miliar– paling banyak Rp10 miliar. Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.
Hasil Penjualan Tahunan	1.Usaha Mikro: paling banyak Rp 300 juta. 2. Usaha Kecil: lebih dari Rp 300 juta – paling banyak Rp 2,5 miliar. 3.Usaha Menengah: lebih dari Rp 2,5miliar – paling banyak Rp 50 miliar.	1.Usaha Mikro: paling banyak Rp 2 miliar. 2.Usaha Kecil: lebih dari Rp 2 miliar – paling banyak Rp15 miliar. 3.Usaha Menengah: lebih dari Rp 15 miliar – paling banyak Rp 50 miliar.

Sumber: <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm, 2021>

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data BPS tahun 2020, Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah 2.986,20 km² dengan jumlah penduduk mencapai 5.427.068 jiwa. Untuk sebaran penduduknya sebesar 2.236jiwa/km² dalam 40 kecamatan, 19 kelurahan dan 416 desa. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor ikut berkontribusi dalam LPE Jawa Barat sejak tahun 2015. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Kabupaten Bogor berpotensi besar dalam pemulihan ekonomi saat ini. Berikut data yang menjelaskan fakta tersebut:

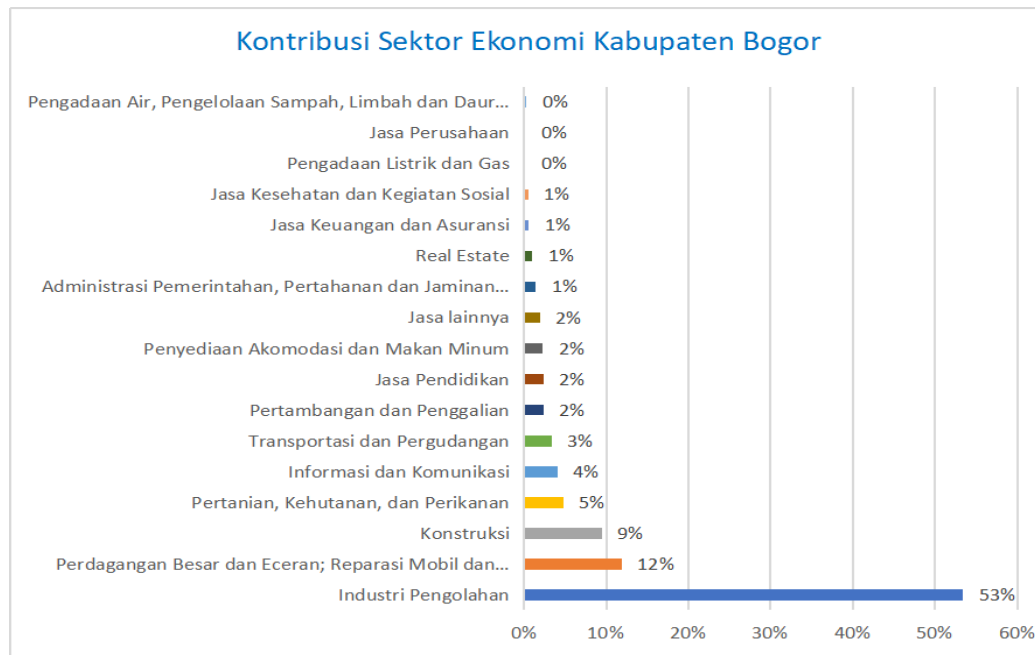


Sumber: BPS Kabupaten Bogor, 2020

Gambar 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bogor

Berdasarkan Gambar 2., dapat dilihat bahwa LPE Kabupaten Bogor cenderung diatas rata-rata LPE jabar yaitu tumbuh diatas 5% hingga 6%. Struktur ekonomi Kabupaten Bogor sebagian besar bersumber pada industri pengolahan sebesar 53% diikuti oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar 12%. Sektor lain yang cukup besar memberikan kontribusi pada perekonomian Kabupaten Bogor terletak pada sektor konstruksi sebesar 9%

diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 5%. Penjelasan lebih rinci yang tersaji pada Gambar 3.



Sumber: BPS Kabupaten Bogor, 2020

Gambar 3. Kontribusi Sektor Ekonomi Kabupaten Bogor Tahun 2020

3.1 Klusterisasi Data UMKM di Kabupaten Bogor

Cakupan UMKM di Kabupaten Bogor jika dilihat dari aktivitas ekonominya tersebar menurut lokasi seperti disajikan pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Jumlah UMKM di Kabupaten Bogor Menurut Lokasi Kecamatan

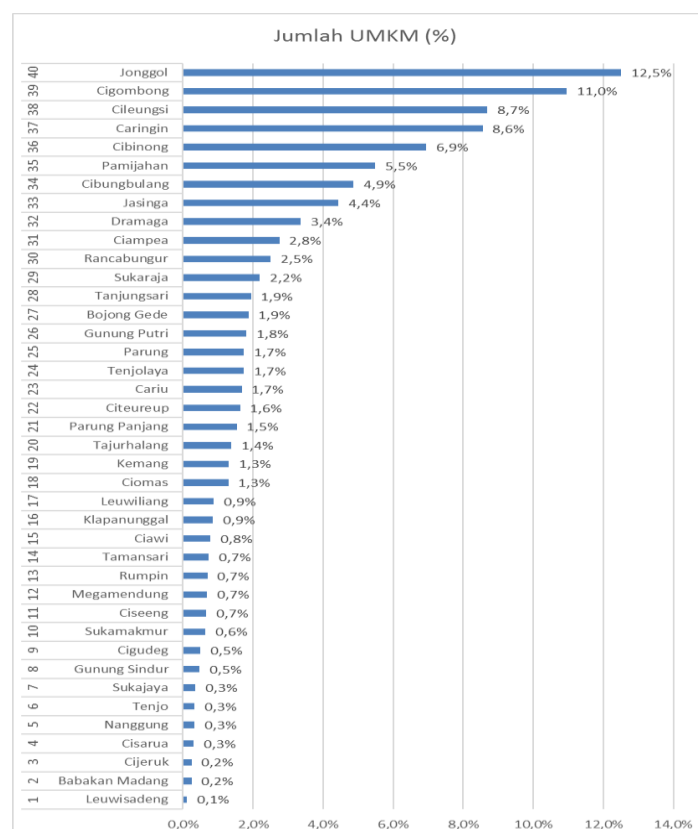
Kategori	Data Dinas Kop & UMKM 2020		Data menurut Indikator Ekonomi Daerah Kab Bogor th 2018	
	Unit	%	Unit	%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.597	45%	61.069	8%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	5.363	43%	141.544	19%
Jasa Lainnya	570	5%	15.339	2%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	467	4%	133.804	18%
Industri Pengolahan	355	3%	29.059	4%
Informasi dan Komunikasi	67	1%	234.251	32%
Pengadaan Listrik dan Gas	65	1%	253	0%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	62	0%	782	0%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4	0%	1.515	0%
Jasa Pendidikan	2	0%	5.926	1%
Konstruksi	1	0%	21.798	3%
Pertambangan dan Penggalian	1	0%	933	0%
Transportasi dan Pergudangan	1	0%	61.665	8%
Jasa Keuangan	1	0%	1.316	0%
Jasa Perusahaan	-	0%	4.122	1%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	0%	8.714	1%
Real Estate	-	0%	15.683	2%
Jumlah UMKM	12.556	100%	737.773	100%

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023

Tabel 4. diatas terlihat bahwa berdasarkan kategori aktivitas ekonominya UMKM di Kabupaten Bogor didominasi oleh jenis usaha dalam bidang penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 45% dan dalam bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Tiga aktivitas ekonomi yang juga banyak digeluti oleh pelaku UMKM di Kabupaten Bogor adalah jasa lainnya, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta industri pengolahan.

Berdasarkan data pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor jumlah UMKM yang terdata sebesar 12.556 unit usaha pada 40 (empat puluh) kecamatan dari berbagai komoditas atau jenis usaha, sementara 333 unit usaha belum jelas kategorinya. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bogor menunjukkan potensi jumlah UMKM yang tinggi. Akan tetapi pada kenyataannya pendataan UMKM pada suatu wilayah administrasi pemerintahan dirasa sulit, sehingga jumlah yang terdaftar adalah dibawah dari jumlah yang riil, dimana masih banyak unit usaha UMKM yang tidak terdaftar. Bahkan sebagian menyatakan angka riil nya adalah 58,7 kali lipat dari yang terdata. Dengan demikian bila jumlah yang terdaftar adalah 12.889 unit, maka dengan asumsi 58,7 kali lipat, berarti jumlah riil nya adalah mencapai 737 ribu unit UMKM di wilayah Kabupaten Bogor menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Jumlah UMKM yang tersebar berdasarkan kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2020 disajikan pada Gambar 4.



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Bogor 2020

Gambar 4. Jumlah UMKM Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bogor

Berdasarkan Gambar 4. diatas, terlihat bahwa Kecamatan Cigombong memiliki jumlah UMKM terbanyak di Kabupaten Bogor sebesar 13% (1.612 UMKM) dari total keseluruhan 12.556 UMKM terdata. Sedangkan jika dilihat berdasarkan keadaan geografi pada Kabupaten Bogor Dalam Angka di Tahun 2020 terlihat bahwa 5 kecamatan dengan jumlah UMKM terbanyak berada pada kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Bogor, seperti:

Tabel 5. Jumlah UMKM dan Urutan Luas Kecamatan Kabupaten Bogor Tahun 2020

Kecamatan	Urutan Luas dari 40 Kecamatan	Jumlah UMKM	%	Luas wilayah (km ²)	Luas wilayah (%)	Urutan 5 terluas	Jumlah UMKM
Jonggol	4	1.605	13%	158,86	5%	Cigudeg	65
Cigombong	10	1.413	11%	96,07	3%	Cariu	216
Caringin	24	1.085	9%	47,16	2%	Nanggung	42
Cileungsi	8	1.075	9%	133,31	4%	Jonggol	1.605
Cibinong	26	836	7%	46,62	2%	Sukajaya	45

Sumber: Kabupaten Bogor dalam Angka 2020

Pada Tabel 5. diatas terlihat bahwa 5 kecamatan dengan urutan wilayah terluas ditempati oleh Kec. Cigudeg, Kec. Cariu, Kec. Nanggung, Kec. Jonggol, dan Kec.Sukajaya. Jika dilihat dari luasan wilayahnya besaran jumlah UMKM pada Kecamatan Cigudeg, Cariu, Nanggung dan Sukajaya tidak berbanding lurus.

3.2 Potensi dan Permasalahan serta Isu-Isu Aktual Tentang UMKM Akibat Covid-19.

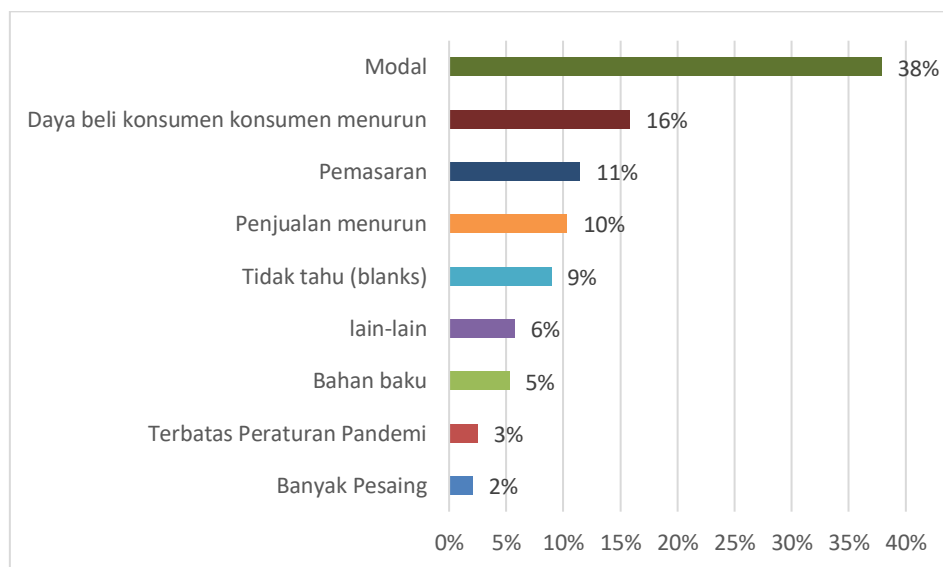
Pandemi Covid-19 yang melanda dunia memberikan dampak negatif bagi berbagai kalangan terutama kalangan usaha, tak terkecuali bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bogor. Akan tetapi, dibandingkan dengan kategori usaha lainnya sektor UMKM memiliki potensi yang mampu memberikan kontribusi dalam pemulihan ekonomi.

Berdasarkan kajian ini, potensi yang dimiliki UMKM menurut kategori usaha akomodasi, makan dan minum sebesar 45% dari keseluruhan lapangan usaha yang ada. Pelaku UMKM dari pengolahan hasil perikanan memiliki potensi dari ragam produk yang bervariasi dan inovatif contohnya olahan *value added* dan konsep *zero waste product*. Hal tersebut dipengaruhi dari potensi bahan baku yang masih tersedia dan didukung sumber daya alam yang melimpah. Rata-rata pelaku UMKM dari sektor perikanan dan peternakan sudah memiliki ruang produksi meski masih perlu perbaikan agar sesuai CPPOB (cara produksi pangan olahan yang baik). Selain itu, potensi juga ditunjukkan oleh lokasi Kabupaten Bogor yang strategis dalam mendukung distribusi pemasarannya. Dilihat dari potensi sumber daya manusia, adanya peralihan karyawan perkantoran yang terkena PHK menjadi pelaku UMKM memberikan kontribusi cukup besar.

Selain potensi yang dimiliki, berbagai masalah pun dihadapi oleh UMKM seperti menurunnya daya beli konsumen, pemasaran, perizinan usaha karena masalah umum yaitu sulitnya UMKM memperoleh izin edar pangan yang disebabkan umumnya ruang produksi UMKM masih bergabung dengan dapur rumah tangga, terbatasnya modal untuk perbaikan ruang produksi, kendala perizinan dasar untuk memenuhi persyaratan legalitas keamanan pangan seperti IMB, Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan/TDU PHP, IPAL, izin lokasi tidak sesuai dengan tata ruang (untuk UMKM skala menengah). Permasalahan lain yang

sering dihadapi oleh pelaku UMKM adalah modal usaha, minimnya kualifikasi dan kompetensi SDM.

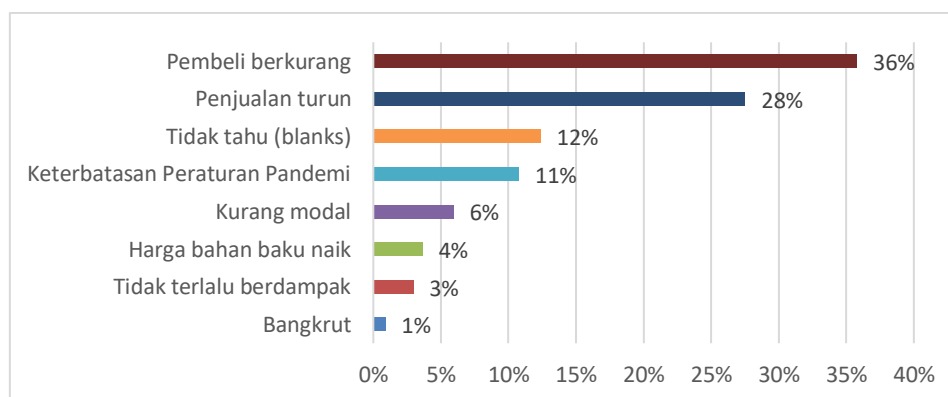
Adapun gambaran potensi dan permasalahan serta isu-isu aktual tentang UMKM akibat Covid-19 dapat terlihat pada Gambar 5. berdasarkan jawaban dari responden. Dari gambaran tersebut terlihat sebanyak 38% para pelaku menghadapi permasalahan dari sisi modal, daya beli konsumen yang menurun sebanyak 16%, issue mengenai pemasaran sebanyak 11%, penjualan yang menurun sebanyak 10%, penyediaan bahan baku, peraturan pandemic turut membatasi ruang gerak dari para pelaku UMKM dan juga munculnya para competitor dadakan akibat banyaknya para pegawai yang asalnya bukan pelaku akhirnya dirumahkan.



Sumber: Data Kuesioner Diolah 2021

Gambar 5. Pernyataan Responden atas Isu-isu yang Dihadapi Selama Pandemi

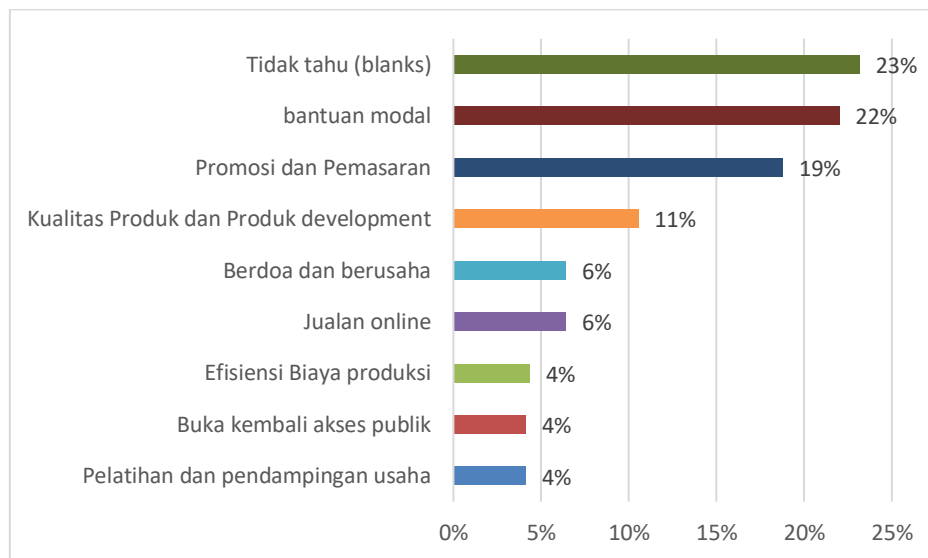
Dari berbagai permasalahan yang terjadi, kegiatan yang memberikan beberapa dampak terhadap pertumbuhan usaha di Kabupaten Bogor setelah adanya Pandemi Covid-19 juga dapat terlihat pada Gambar 6.



Sumber : Data Kuesioner Diolah, 2021

Gambar 6. Pernyataan Responden atas Dampak terhadap Pertumbuhan Usaha Terjadi Setelah Pandemi Covid-19

Berdasarkan Gambar 6. Dapat dilihat bahwa dampak yang sangat terasa adalah berkurangnya daya beli dari masyarakat sebanyak 36%, penjualan menurun sebanyak 28% dari para pelaku UMKM, sebanyak 12% merasa kebingungan sehingga tidak dapat menyimpulkan dampak yang terasa, 11% pelaku UMKM menghadapi keterbatasan atas peraturan selama pandemic, sebanyak 6% merasa kekurangan atas modal usahanya, sebanyak 4% mengalami dampak atas naiknya harga bahan baku sampai menjadi bangkrut sebanyak 1%. Akan tetapi, pelaku UMKM melakukan beberapa cara bertahan untuk menjalankan usahanya, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa rekomendasi atas permasalahan, potensi dan dampak yang terjadi tertuang pada Gambar 7.



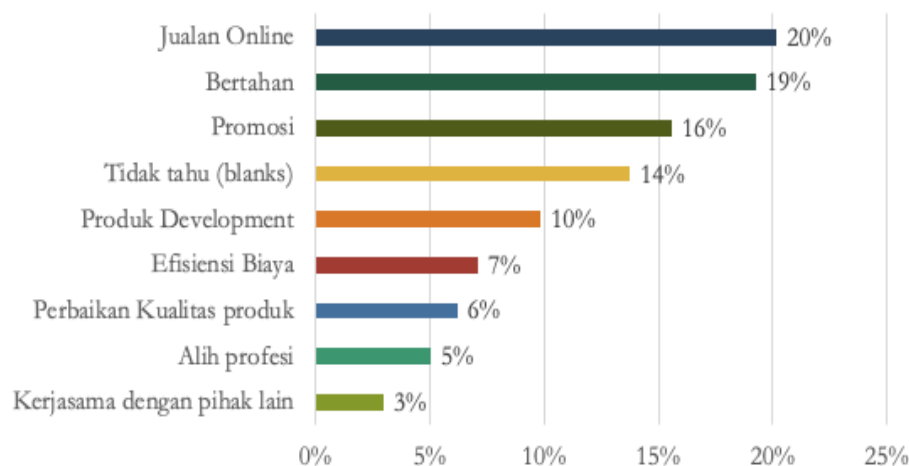
Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2021

Gambar 7. Pernyataan Responden mengenai Rekomendasi atas Permasalahan, Potensi dan Dampak yang Terjadi pada Usaha

Jika dilihat pada Gambar 7, respon pelaku UMKM dalam menghadapi Covid-19 paling banyak mengatakan tidak tahu yakni sebesar 23%. Sedangkan untuk respon melakukan pelatihan dan pendampingan usaha hanya sebesar 4%. Hal tersebut menunjukkan diperlukannya kajian yang lebih mendalam terutama oleh pemerintah dalam rangka pemberian solusi menghadapi dampak Covid-19.

3.3 Analisis Strategi Pemulihan Ekonomi Daerah Sektor UMKM Pasca Pandemi Covid-19 dalam Rangka Mencari Alternatif Model Pengembangan

Berbagai strategi yang dilakukan untuk menghadapi pandemi Covid-19 terutama pada sektor UMKM. Strategi tersebut meliputi jualan online, hanya bertahan hingga kerja sama dengan pihak lain. Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh beberapa strategi pelaku UMKM dalam menghadapi pandemi Covid-19 dijabarkan pada Gambar 8.



Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2021

Gambar 8. Strategi Pelaku UMKM Kabupaten Bogor Menghadapi Pandemi Covid-19

Jika dilihat pada Gambar 8., strategi yang paling banyak dilakukan adalah berjualan online sebanyak 20% dan strategi yang paling sedikit dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan pihak lain sebesar 3%. Sedangkan jika dilihat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan usaha para pelaku UMKM yakni modal, peraturan pemerintah, promosi, pelatihan dan kolaborasi disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Pengujian Statistika

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	1,028	,033		,000
	Modal (X1)	-,005	,022	-,011	,825
	Peraturan (X2)	,028	,023	,061	,226
	Promosi (X3)	-,015	,018	-,042	,380
	Pelatihan (X4)	,030	,020	,073	,149
	Kolaborasi (X5)	,000	,020	,000	,993

a. Dependent Variable: Dampak (Y)

Ringkasan Analisis Regresi Multiples (Berganda)

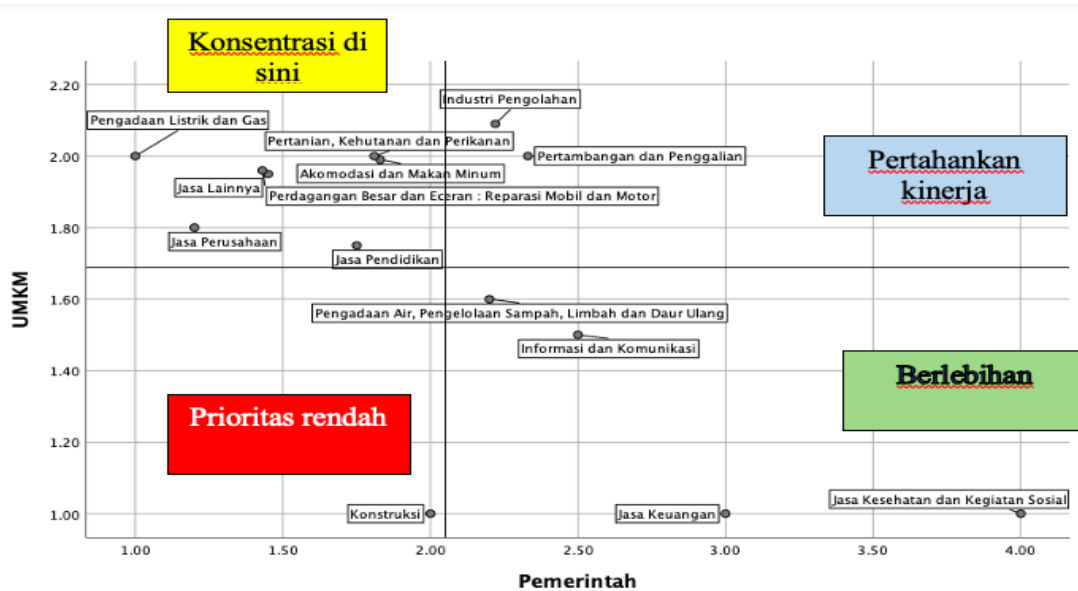
Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	sig
Konstanta	1,028		
X1	-0,005	-0,221	0,825
X2	0,028	1,211	0,226
X3	-0,015	-0,878	0,380
X4	0,030	1,447	0,149
X5	0,000	0,009	0,993

Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang ditunjukkan pada Tabel 6. diperoleh bahwa ke-5 faktor yakni modal, peraturan pemerintah, promosi, pelatihan dan kolaborasi tidak memberikan pengaruh dalam pertumbuhan usaha para pelaku UMKM setelah terjadinya

pandemi Covid-19, faktor yang paling mempengaruhi adalah kesehatan karena jika telah terpapar maka pelaku UMKM tidak dapat berjualan.

Untuk mengetahui antara kinerja pemerintah dengan kondisi UMKM digambarkan dalam kuadran modifikasi berdasarkan kondisi makro dan kewilayahan suatu daerah, adapun gambarannya dijelaskan sebagai berikut:



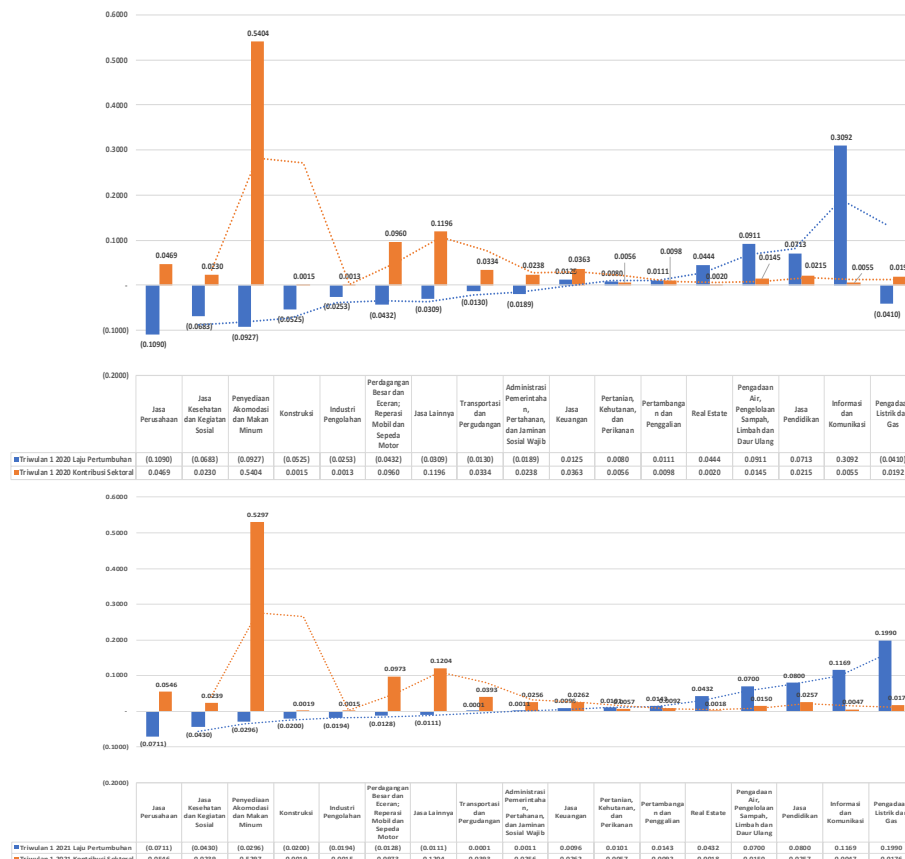
Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2021

Gambar 1. Peta Kondisi UMKM di Kabupaten Bogor

Berdasarkan Gambar 9. Dapat diketahui bahwa mayoritas sektor berada di sekat 1, menunjukkan adanya konsentrasi disini. Kinerja pemerintah terkait program kebijakan dapat difokuskan pada UMKM yang berada di sektor-sektor di sekat 1, antara lain; jasa perusahaan, pengadaan listrik dan gas, pertanian dan kehutanan, akomodasi makan dan minum, perdagangan eceran, dan jasa lainnya. Kinerja baik pemerintah sangat dirasakan pada UMKM yang berada di industri pengolahan (sekat 2 pertahankan kinerja), industri banyak terbantu oleh program pemerintah saat pandemi. sedangkan sektor lainnya yang berada di sekat 3 sudah mendapatkan perhatian besar, namun kondisi pandemi mengharuskan mereka mengubah haluan usaha. Pemerintah dapat mendorong UMKM di sektor tersebut untuk berani bereksplorasi agar dapat bergeser ke sekat 2. Dengan menggunakan analisis kuadran, memudahkan untuk melihat UMKM di sektor mana saja yang perlu perhatian khusus dari pemerintah, agar kebijakan dapat lebih terarah.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektoral diperlukan untuk melihat strategi pemulihan ekonomi daerah sektor UMKM pasca pandemi Covid-19. Gambar 10 tersaji pertumbuhan dan kontribusi sektoral kabupaten Bogor, dimana sektor yang mengalami pertumbuhan negatif di triwulan pertama adalah sektor UMKM seperti akomodasi makan dan minum, jasa perusahaan, industri pengolahan, hingga transportasi dan perdagangan. Jika dilihat dari kontribusinya, akomodasi makan minum merupakan contributor tertinggi di masa pandemi dengan kontribusi pendapatan bruto mencapai 54%. Di sisi lain, terdapat sektor komunikasi

yang mengalami pertumbuhan positif, yang artinya sektor tersebut dapat membantu sektor lain yang mengalami keterpurukan untuk mengakses pasar yang jauh lebih luas. Hal tersebut menjadi 6 kebijakan dalam APBD perubahan 2020 dan APBD tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai rujukan dalam strategi pemulihan ekonomi daerah sektor UMKM pasca pandemi Covid-19.



Sumber: Data Kuesioner Diolah, 2021

Gambar 20. Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektoral Triwulan 1 Tahun 2021 dan 2022

a) Strategi Pemulihan 1

Dengan menggunakan Analisis IPA yang dijelaskan Gambar 10 pada sekat 1 (konsentrasi disini) terdapat kebijakan pertama yaitu memperluas daftar positif investasi, percepatan proses perizinan, serta keringanan dan relaksasi pajak daerah bagi dinas untuk penciptaan iklim usaha yang kondusif, dapat dilihat bahwa kinerja UMKM sudah bagus akan tetapi kurang didukung oleh kebijakan dari pemerintah. Terlihat salah satu contoh permasalahan yang terjadi pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan sangat membutuhkan dukungan atas percepatan proses perizinan demi kelancaran proses bisnis para pelaku UMKM di sektor tersebut.

b) Strategi Pemulihan 2

Pemberian bantuan permodalan bagi pelaku UMKM serta percepatan pemulihan sektor lainnya seperti pangan dan pariwisata menjadi strategi pemulihan lainnya yang diberikan

pemerintah. Berdasarkan hasil survey diperoleh bahwa sebanyak 70% UMKM telah menerima bantuan permodalan dari pemerintah dan 30% UMKM belum merasakan bantuan permodalan. Hal tersebut mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usahanya.

c) *Strategi Pemulihan 3*

Memberikan perlindungan kepada jenis-jenis usaha tertentu seperti sektor pertanian, perikanan, peternakan berupa peraturan daerah atau peraturan bupati tentang perlindungan usaha. Berdasarkan hasil survey sebanyak 74% para pelaku UMKM belum mendapatkan perlindungan usahanya dan sisanya sudah mendapatkannya.

d) *Strategi Pemulihan 4*

Melakukan pengembangan promosi dan pemasaran digital, berdasarkan hasil survey terbukti bahwa 67% pelaku UMKM melakukan proses pemasarannya melalui media sosial, namun ada 25% yang masih belum melakukan dan sebanyak 8% belum mengetahui cara pemasaran secara online. Oleh karena itu, strategi yang bisa dilakukan adalah melakukan pelatihan-pelatihan promosi dan pemasaran digital.

e) *Strategi Pemulihan 5*

Strategi pemulihan yang dipilih adalah pelatihan kompetensi bagi pelaku UMKM. Dengan meningkatnya kemampuan dari para pelaku maka diharapkan pendapatan mereka pun akan meningkat, mengingat sebanyak 59% para pelaku masih belum mendapat pelatihan yang pada saat pandemi seperti ini hanya bisa dilakukan dengan daring, meskipun 41% sudah pernah melakukan pelatihan yang diberikan oleh berbagai dinas yang terkait.

f) *Strategi Pemulihan 6*

Memantapkan sinergi dengan asosiasi atau forum atau himpunan dunia usaha. Sebanyak 51% para pelaku sudah menjalin kerjasama dan berkolaborasi dari beberapa asosiasi, forum, himpunan dunia usaha, serta akademisi. Akan tetapi 49% mereka belum berkolaborasi, hal ini pun menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah agar memberikan arahan, motivasi dan jika diperlukan suatu peraturan agar para pelaku tersebut mengembangkan sayapnya melalui jejaring. Jika mengacu pada *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan Pembahasan Raperda P-RPJMD 2018-2023, dan dalam rangka mendukung Program Panca Karsa-Bogor Maju, strategi pemulihan ekonomi daerah sektor UMKM pasca pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan cara :

1. Protokol kesehatan ketat dalam menjalankan aktivitas ekonomi oleh UMKM
2. Peningkatan kualitas pelaku usaha melalui arah kebijakan optimalisasi kemitraan UMKM dengan dunia usaha
3. Peningkatan peluang investasi dengan mengembangkan penanaman modal dan peta investasi.
4. Optimalisasi promosi investasi dan pemasaran produk melalui arah kebijakan menyelenggarakan promosi investasi, fasilitas pemasaran produk dan menggalakkan Gerakan bela beli produk UMKM/IKM.

3.4 Potensi Produk Unggulan di Kabupaten Bogor

Produk unggulan daerah (PUD) merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu. Kabupaten Bogor memiliki SDA potensial sudah dan selalu dikembangkan untuk bisa menjadi komoditas unggulan baik di tingkat kabupaten, regional maupun tingkat nasional bahkan internasional.

Tabel 7. Zona Potensi Unggulan Daerah

Agrosilvopastural Rumpin, Cigudeg, Parung Panjang, Jasinga, Tenjo	Agro Ekowisata Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cibungbulang, Pamijahan	Industri Non Farm Ciampea, Tenjoaya, Dramaga, Ciomas	Pedesaan UMKM Tajurhalang, Kemang, Rancabungur, Parung, Ciseeng, Gunung Sindur
Pertanian dan Agroekowisata Tamansari, Cijeruk, Cigombong, Caringin	Ekowisata Ciawi, Cisarua, Megamendung, Sukaraja, Babakan Madang	Pertanian Perkotaan dan Industri Cileungsi, Klapanunggal, Gunung Putri, Citeureup, Cibinong, Bojonggede	Lumbung Pangan Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Jonggol

Sumber: Bappedalitbang, 2019

Kebijakan pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Bogor didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan, dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 tentang Peningkatan Daya Saing Komoditas Kabupaten Bogor serta hasil-hasil kajian pengembangan komoditas unggulan kecamatan oleh Bappedalitbang Kabupaten Bogor, yang diantaranya memuat zonasi dan arah pengembangan sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Berdasarkan Tabel 7. diatas dijelaskan bahwa Kabupaten Bogor memiliki sentra komoditas unggulan sesuai zonasi dan mulai dikembangkan didaerah lain yang sesuai dengan karakteristik komoditasnya. Adapun Kondisi Potensi Komoditas Unggulan Kabupaten Bogor disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Komoditas Unggulan Primer Kabupaten Bogor Tahun 2018

No	Kegiatan/ Usaha/Sektor	Data		
		Jenis Komoditi Unggulan	Produksi / Populasi Keseluruhan	Lokasi Desa/Kecamatan
1	Usaha Tanaman Pangan	Ubi Kayu (ton)	101.276	Cibungbulang, Cibinong, Citeureup, Babakan Madang, Sukajaya dan Sukamakmur
		Ubi Jalar (ton)	52.839	Tamansari, Ciomas, Ciampea, Tenjolaya, Pamijahan, Cibungbulang, Leuwiliang dan Leuwisadeng

No	Kegiatan/ Usaha/Sektor	Data		
		Jenis Komoditi Unggulan	Produksi / Populasi Keseluruhan	Lokasi Desa/Kecamatan
2	Usaha Hortikultura	Talas (ton)	12.690	Cijeruk, Tamansari, Dramaga, Caringin, Cibungbulang, Cigombong dan Pamijahan
		Pepaya (ton)	6.140	Sukaraja, Caringin, Jasinga, Rancabungur dan Cigudeg, Tenjo
		Manggis (ton)	6.543	Leuwiliang, Leuwisadeng, Cigudeg, Klapanunggal, Sukamakmur, Nanggung dan Jasinga
3	Perkebunan Rakyat	Jambu Biji (Kristal) (ton)	5.217	Rancabungur, Tamansari, Tajur Halang, Dramaga, Caringin, Cibungbulang, Cigombong dan Pamijahan
		Rambutan	17.376	Gunung Putri
		Pala (ton)	366	Ciawi, Cigombong, Caringin, Cijeruk, Sukajaya, Tamansari, Leuwisadeng dan Megamendung
		Karet (ton)	109	Jasinga, Tanjungsari, Cigudeg
		Cengkeh (ton)	167	Nanggung, Pamijahan, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cijeruk, Caringin dan Cariu
4	Usaha Perikanan	Sukamakmur, Pamijahan, Cisarua, Cigombong, Babakan Madang, Megamendung, Cariu dan Tanjungsari	3.210	Kopi (ton)
		Lele (ton)	88.780,63	Ciseeng, Parung dan Kemang
		Mas (ton)	11.071,87	Pamijahan dan Leuwiliang
		Gurame (ton)	5.510,66	Dramaga, Bojonggede dan Parung
		Ikan hias air tawar (RE)	283.469,46	Cibinong dan Ciampea
		Benih Ikan Konsumsi (RE)	5.545.493	Cibinong, Ciampea dan Parung
		Sapi potong (ekor)	18.853	Jonggol, Cariu dan Tanjungsari
5	Usaha Peternakan Ternak Besar	Sapi perah (ekor)	8.269	Pamijahan, Cibungbulang, Cisarua, Ciawi, Megamendung dan Cijeruk

Sumber: Bappedalitbang, 2019

Selanjutnya komoditi unggulan sekunder di 40 Kecamatan tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9. Komoditas Unggulan per Kecamatan Tahun 2014-2018

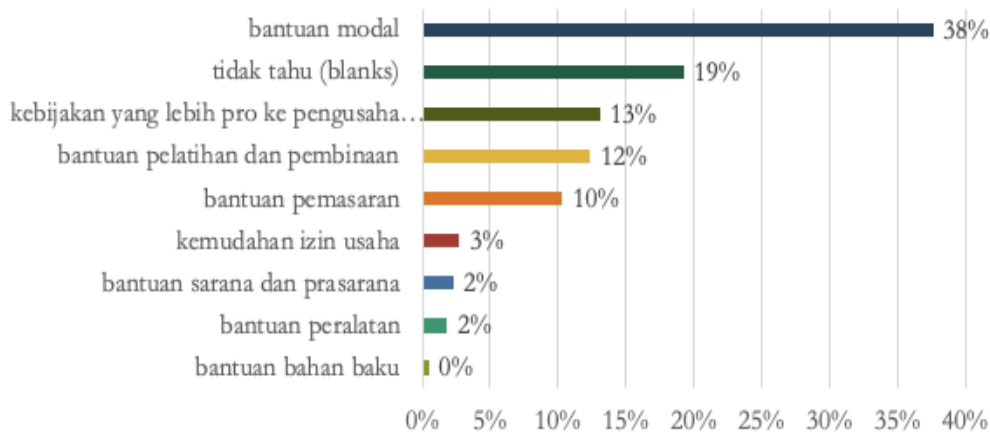
No	Kecamatan	Komoditi Unggulan Sekunder
1	Babakan Madang	Aneka Minuman/Kopi/Jahe, jamur, belut, loga,
2	Bojong Gede	Aneka minuman/nata de coco, boneka muslim, jambu merah
3	Caringin	Alas kaki/sepatu bayi, tas, boneka, laying-layang, handycraft, baju muslim
4	Cariu	Aneka Makanan, sepatu, tas
5	Ciampea	Kerajinan/tas, Pandai besi, Jaket, wayang golek, makanan, minuman
6	Ciawi	Aneka makanan/kue brownies, boneka, konveksi, anyaman bamboo, peci, pisang, makanan, minuman
7	Cibinong	Aneka minuman/nata de coco, wajan, handycraft, konveksi
8	Cibungbulang	Alas Kaki, Konveksi, Tas

No	Kecamatan	Komoditi Unggulan Sekunder
9	Cigombong	Aneka Makanan, akar, dandang, boneka
10	Cigudeg	Aneka Makanan, Masker, bunga kering, jambu merah, batu fosil
11	Cijeruk	Alas kaki, anyaman bamboo, dandang
12	Cileungsi	Aneka Minuman, makanan, herbal, tas, sepatu, kerajinan timah
13	Ciomas	Alas kaki
14	Cisarua	Aneka makanan/kue pelangi, bumper mobil, rajutan, aneka souvenir
15	Ciseeng	Kerajinan Logam, konveksi, ikan hias, ikan konsumsi
16	Citeureup	Kerajinan Logam, handycraft
17	Dramaga	Aneka minuman/minuman pala
18	Gunung Putri	Kerajinan/sangkar burung, sabuk/gesper, makanan minuman, tas
19	Gunung Sindur	Aneka Makanan, Madu organic
20	Jasinga	Kerajinan Kayu, tas, karet, gula aren
21	Jonggol	Aneka Makanan, pakaian jeans
22	Kemang	Alas kaki, Aneka makanan dodol, rengginang, Kerudung payet.
23	Klapa Nunggal	Kerajinan/boneka, kaset, logam, pigura, pelepah, anyaman bamboo
24	Leuwiliang	Bahan bangunan/bata merah, kerajinan per, makanan minuman
25	Leuwi Sadeng	Bahan bangunan/bata merah, bunga kering
26	Megamendung	Aneka makanan/gemblong, peci, kantong kertas, aneka handycraft
27	Nanggung	Kerajinan Logam, alat pertanian, golek, batu gading
28	Pamijahan	Aneka makanan/kue cincin, Aneka <i>Handycraft</i> , furniture
29	Parung	Aneka Makanan, konveksi mukena, olahan ikan asap
30	Parung Panjang	Aneka Makanan, bata merah
31	Rancabungur	Aneka Makanan, Ketel set, knalpot
32	Rumpin	Aneka Makanan, Bambu, benang, kayu
33	Sukajaya	Konveksi, golok
34	Sukamakmur	Aneka Minuman/Kopi, anyaman bamboo, baju jeans
35	Sukaraja	Aneka makanan/Olahan ubi kayu, miniature kapal, tapioca
36	Tajur Halang	Aneka Makanan, bunga plastic, anyaman bambu
37	Tamansari	Alas kaki, hortikultura, tanaman hias, makanan minuman
38	Tanjungsari	Kerajinan Kayu
39	Tenjo	Aneka Makanan, pot kayu, dodol, madu
40	Tenjolaya	Bunga kering, anyaman bamboo, plakat

Sumber: Bappedalitbang, 2019

3.5 Usulan Program dan Kegiatan dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah Sektor UMKM di Kabupaten Bogor

Para pelaku UMKM mengusulkan beberapa program dalam rangka pemulihan ekonomi berupa bantuan modal dari pemerintah daerah dan juga swasta yang paling banyak membutuhkan sebanyak 38%. Banyak juga yang menginginkan agar dibuat kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku UMKM (13%), program bantuan pelatihan dan pembinaan (10%), bantuan pemasaran (10%) kemudahan izin usaha (3%), bantuan sarana dan prasarana (2%), bantuan peralatan produksi (2%) serta bantuan pemenuhan bahan baku.



Sumber: Bappedalitbang, 2019

Gambar 3. Usulan Program Pemulihan Ekonomi dari Pelaku UMKM

Untuk mengakomodir aspirasi dari para pelaku tersebut, diperlukan beberapa rumusan usulan program dan rencana kegiatan berdasarkan sektor kedinasan :

Tabel 10. Rumusan Usulan Program dan Rencana Kegiatan Menurut Sektor Kedinasan

No	Dinas	Kegiatan yang Sudah Terlaksana	Usulan Program yang Belum Terlaksana
1	Dinas Ketahanan Pangan	- Fokus peningkatan strategi pengembangan promosi & pemasaran digital dari 2018 sd saat ini - Pengembangan Industri Pangan Lokal olahan non terigu - Monitoring oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Bapak Arie Wibowo dalam rangka development skill, target pasar, dll - Langkah nyata seperti daftar olahan ke dalam e-commerce. - Aliansi kuliner Indonesia dengan sector hotel, rest area dan sekotr lain yang memungkinkan. - penyuluhan kepada masyarakat secara berkelanjutan agar menjadi pintar memilih produk yang memenuhi standar keamanan pangan dan bergizi	- Fokus ke upskill konten branding - Sertifikasi uji keamanan pangan rantai sejalan asalah tumbuhan olahan - Program peningkatan ketersediaan, akses dan konsumsi pangan - Program pemberdayaan daerah rawan pangan
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	- Penanganan rest area Puncak 7 Ha tahun 2022 sudah dapat direalisasi - Penyelesaian pasar rakyat yang sudah tidak layak - Mendorong export dan misi dagang, pameran dagang nasional dan internasional - Pemasaran digital termasku ke dalam program penyelamatan, karena : 2019-2020 pemulihan 2020-2021 penyelamatan 2022-2023 pemantapan	- Lanjutan program fasilitasi pemasaran dalam kegiatan Bimbingan Teknis Marketing Online - Lanjutan program fasilitasi mesin peralatan produksi IKM - Lanjutan program fasilitasi pembinaan dan pemberian sertifikat PKP - Lanjutan program fasilitasi pembinaan IKM unggulan

No	Dinas	Kegiatan yang Sudah Terlaksana	Usulan Program yang Belum Terlaksana
3	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan	- Melaksanakan panca karsa 2019, Disdagin & Koperasi - Gerakan Bela Beli UKM dengan cara konsumsi produk UKM, IKM oleh ASN. - Pemberdayaan PD Pasar Tohaga dengan pembelian beras oleh ASN - Gerakan tanaman padi - Gerakan tanaman hias	- Lanjutan pendataan bagi IKM yang terdampak - Program pengembangan SDM Pertanian dan Penyuluhan - Program peningkatan produksi tanaman pangan - Program peningkatan produksi hortikultura - Program perlindungan tanaman pertanian dan perkebunan - Program peningkatan produksi perkebunan - Program Pengembangan pembenihan pertanian - Program Pengawasan dan Sertifikasi benih pertanian.
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	- Adanya bedah ruang produksi untuk memenuhi syarat keamanan pangan dalam rangka memperoleh izin edar - Pembinaan berkesinambungan tentang inovasi produk dan mutu - Fasilitasi peralatan dan kemasan - Bantu/fasilitasi UMKM untuk melengkapi izin edar, sertifikasi halal, merek agar bisa pasarkan produk secara luas termasuk melalui digital marketing/market place	- Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan menjahit, Pelatihan computer, Pelatihan tata rias) - Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat (Pelatihan pembuatan kue dan pemasaran online)
5	Dinas Perikanan dan Peternakan	<i>Perikanan</i> Peningkatan daya saing produk pengolahan hasil perikanan melalui : 1) Pembinaan diseminasi pengolahan hasil perikanan bekerjasama dengan Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan Perikanan dan IPB, 2) Diversifikasi pengolahan hasil bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan serta Pokja III TP PKK Kab Bogor, 3) Pembinaan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) bekerjasama dengan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan KKP dan Loka BPOM, untuk memenuhi standar keamanan pangan dalam rangka pemenuhan syarat izin edar pangan (Sertifikasi Kelayakan Pengolahan/ SKP atau GMP Sertificate, PIRT, MD BPOM, HACCP, Halal dll),	<i>Perikanan:</i> - Mengadakan sarana IPAL - Meningkatkan frekuensi pembinaan tentang inovasi produk dan mutu - Meningkatkan pelatihan terkait sertifikasi keamanan pangan <i>Peternakan:</i> - Mendorong partisipasi perusahaan2 melalui dana CSR membantu UPH peternakan skala UMKM baik utk meningkatkan sarana peralatan maupun bangunan agar sesuai CPPOB dan bisa mendapat izin edar - Bekerjasama dengan Dinas Pariwisata membantu promosi produk2 olahan

No	Dinas	Kegiatan yang Sudah Terlaksana	Usulan Program yang Belum Terlaksana
		4) memfasilitasi bantuan peralatan pengolahan, kemasan dan fasilitasi pemasaran seperti branding produk, memfasilitasi bantuan gerobak pemasaran pengolahan hasil perikanan dan peralatan pendukung untuk PKM bagi Program Keluarga Harapan dan anggota LMDH di lokasi wisata Perhutani	peternakan pada objek2 wisata, hotel dan restoran - Perlu dukungan instansi terkait untuk membina masyarakat secara berkelanjutan agar lebih memperhatikan keamanan pangan. Upaya UMKM memproduksi pangan yang aman dari sisi keamanan pangan dengan memperhatikan CPPOB dan mendapat izin edar, konsekwensinya akan menambah biaya, sehingga harga produk akan menjadi lebih tinggi dibanding produk sejenis yg belum dilengkapi dan belum memperhatikan CPPOB. Kondisi saat ini konsumen lebih memilih produk dengan harga yang murah. Jika kondisi masih seperti itu, pembinaan pada UMKM masalah CPPOB, Izin edar menjadi sulit diterapkan pelaku usaha Karena produk mereka kalah bersaing dari sisi harga
		<i>Peternakan</i>	
		1) Pertemuan Diseminasi Pengolahan Hasil Peternakan untuk UMKM dan Kelompok budidaya ternak dengan materi demonstrasi pengolahan hasil peternakan dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Jenis produk yang didemonstrasikan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi UMKM/Kelompok	- Izin edar mensyaratkan bangunan yang memenuhi ketentuan CPPOB. Permasalahan apabila UMKM dikenakan aturan mengurus IMB akan sangat memberatkan dan menjadi salah satu beban pikiran dan beban usaha bagi UMKM. Diharapkan ada kebijakan terkait aturan IMB untuk meringankan beban UMKM
		2) Bimtek Pengembangan Pemasaran. Materi mengenai Digital Marketing, Food Photography dan Kemasan . Kerjasama dengan narasumber dari beberapa operator e-commerce, Praktisi Food Photography dan Kemasan.	
		3) Pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), kerjasama dengan BPOM RI dan Loka POM di Kabupaten Bogor	
		4) Fasilitasi Pembinaan/Asistensi untuk proses izin edar, kerjasama dengan Loka POM di Kabupaten Bogor	
		5) Fasilitasi Pembinaan/Asistensi untuk proses sertifikasi halal, kerjasama dengan LPPOMMUI	
		6) Promosi, melalui bazaar bulanan, Pameran Tingkat Kabupaten, Provinsi Jawa Barat dan Nasional	
		7) Bantuan Sarana Penanganan/Pengolahan Hasil Peternakan	

4. PENUTUP

Potensi yang dimiliki UMKM Kabupaten Bogor menurut kategori usaha akomodasi, makan dan minum sebesar 45% dari keseluruhan lapangan usaha yang ada. Pelaku UMKM dari pengolahan hasil perikanan memiliki potensi dari ragam produk yang bervariasi dan inovatif contohnya olahan *vallue added* dan konsep *zero waste product*. Selain potensi yang dimiliki, berbagai masalah pun dihadapi oleh UMKM pada masa pandemi Covid-19 seperti menurunnya daya beli konsumen, pemasaran, perizinan usaha karena masalah umum yaitu sulitnya UMKM

memperoleh izin edar pangan yang disebabkan umumnya ruang produksi UMKM masih bergabung dengan dapur rumah tangga, terbatasnya modal, perizinan dasar untuk memenuhi persyaratan legalitas keamanan pangan, izin lokasi tidak sesuai dengan tata ruang (untuk UMKM skala menengah). Permasalahan lain yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM adalah minimnya kualifikasi dan kompetensi SDM.

Terdapat lima strategi pemulihan ekonomi yang menjadi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bogor yaitu: 1) Kemudahan izin usaha; 2) Bantuan modal; 3) Perlindungan jenis-jenis komoditas; 4) Pelatihan promosi dan pemasaran digital; 5) Pelatihan kompetensi SDM untuk Pelaku UMKM. Berdasarkan strategi tersebut diperoleh usulan Program dan Kegiatan dalam upaya pemulihan ekonomi daerah sector UMKM di Kabupaten Bogor yaitu: 1) Bantuan modal; 2) Dibuat kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku UMKM; 3) Pelatihan dan pembinaan 4) Bantuan pemasaran; 5) Kemudahan izin usaha; 6) Bantuan sarana dan prasarana; 7) Bantuan peralatan produksi serta; 8) Bantuan pemenuhan bahan baku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, S. dan Sari, Y. (2018). *Implementasi Data Mining Menggunakan WEKA*. Malang: UB press. P.98.
- Anugerah, F. N., & Nuraini, I. (2021). Peran UMKM dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 5(1), 27-41.
- Bramasta, D. B. (2020). Siap-siap Resesi Ekonomi, Ini Dampak dan Cara Mengatasinya. Diakses 22 Juli 2021 dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/23/123000565/siap-siap-resesi-ekonomi-ini-dampak-dan-cara-mengatasinya-?page=all>
- BPS. (2021). Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019-2021. Diakses 22 Juli 2021 dari <https://bogorkab.bps.go.id/indicator/52/43/1/laju-pertumbuhan-pdrb-menurut-lapangan-usaha.html>
- Halim, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157-172.
- Kadeni, N. S. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8(2), 191-200.
- Lestari, D. (2017). Sistem Klasifikasi Pelanggan Untuk Monitoring Tagihan Berbasis Web Dengan Algoritma C 4.5 (Studi Kasus Di PT Indosmart Group Indonesia). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(1).
- Mutrofin, K., Muhammad, A. N., & Mahmud, M. (2021). Peran UMKM dalam mempertahankan ekonomi Jawa Timur selama pandemic Covid-19. *Jurnal El-Idaarah*, 1(2).
- Prilianti, K.R, dan Wijaya, H. (2014). Aplikasi Text Mining untuk Automasi Penentuan Tren Topik Skripsi dengan Metode K-Means Clustering. *Jurnal Cybermatika*, 2(1).
- Putra, A. H. (2016). Peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2), 40-52.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137-146.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 11(1), 33-64.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Syahputra, G. (2014). Penerapan Algoritma C4. 5 Dalam Analisa Kelayakan Penerima Bonus Tahunan Pegawai (Studi Kasus: PT. Multi Pratama Nauli Medan). *Jurnal Mantik Penusa*, 16(2).
- Wahyunti, S. (2020). Peran strategis UMKM dalam menopang perekonomian Indonesia di tengah pandemi Covid-19. *J-Esa (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2), 280-302.
- Widayu, H., Nasution, S. D., Silalahi, N., & Mesran, M. (2017). data mining untuk memprediksi jenis

transaksi nasabah pada koperasi simpan pinjam dengan algoritma C4. 5. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 1(2).

Zaki, M.J., and Meira, Wagner. (2014). *Data Mining And Analysis*. New York : Unites States of America. P.2